



RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022

DINAS SOSIAL

KABUPATEN TEMANGGUNG



2021

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS SOSIAL

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

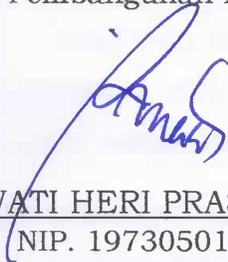
DINAS SOSIAL

TAHUN 2022

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

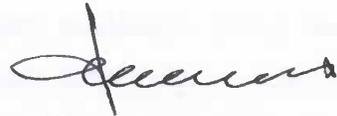
Pada Tanggal : 7 September 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, M.M
NIP. 19730501 199603 2 004

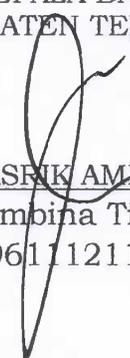
Sub Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117199031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C.MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196111211987031006

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga telah tersusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Rencana Kerja digunakan sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 yang perlu disusun dalam dokumen, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan 4, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Temanggung, 7 September 2021



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19660402 198903 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

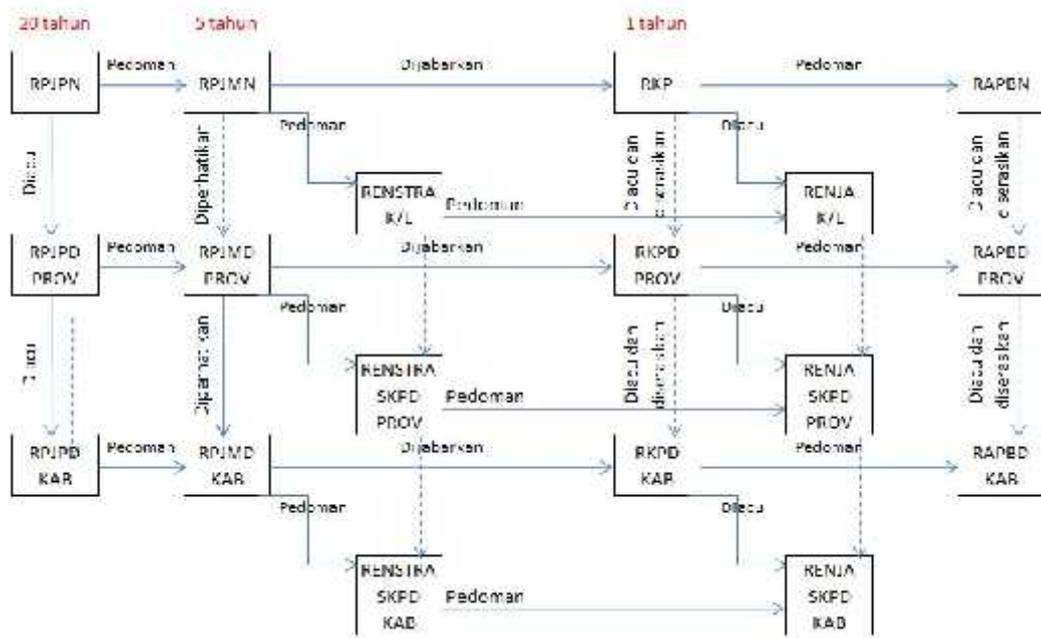
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Sosial, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang

diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Sosial, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Sosial;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial);
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Sosial;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Sosial; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Sosial.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Sosial;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Sosial;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Sosial dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya,

serta capaian kinerja Renstra Dinas Sosial).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Sosial. Namun dalam proses ini Dinas Sosial mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Sosial dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Sosial dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial) Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN
2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	BIDANG SOSIAL																		
1	Program perlindungan dan jaminan sosial																		
a.	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya a Bisnis Proses PKH (Pemutakhiran, Verifikasi, P2K2, Penyaluran Bansos)	bulan	60	10.500.000	24	2.771.520	30964	377,582,000	77,399,400	36876	77,098,000	100	99.61	67,840	383,909,600	40.36	23.10	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

		Terkoordinasi Kegiatan di internal PPKH (Kabupaten dengan Kecamatan) maupun dengan OPD Lain	Kecamatan dan OPD Terkait	100		20		20			20	100		40	0	40.00		
		Peningkatan & Pengembangan Kapasitas SDM PKH	orang SDM PKH	700		140		140			140	100		280	0	40.00		
b.	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terfasilitasinya pemberian bantuan sosial santunan kematian bagi penduduk miskin Kab. Temanggung yang tepat dan tertib administrasi	bulan	60	858.484.000	12	189.181.950	12	208,860,000	109,587,000	12	105,813,850	100	96.56	24	294,995,800	40.00	34.36
		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Non Potensial	orang	2000		376		400			397	0	99.25	0	773	0	38.65	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

		Terfasilitasinya Bansos Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat/Ganda	orang	1000		196		200			199	0	99.5	0	395	0	39.50		
		Terfasilitasinya Bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	orang	835		164		167			140	0	83.83	0	304	0	36.41		
		Terfasilitasinya Bansos Permakanan Anak Panti Asuhan	anak	1855		371		371			381	0	100	0	752	0	40.54		
		Terlaksananya layanan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	persen	100		100		100			100	0	100	0	100	0	100		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

c.	Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan meningkatnya keharmonisan masyarakat korban bencana / Terlaksananya pelayanan psikososial bagi korban bencana	bulan	60	618.729.000	12	106.031.900	12	117,650,000	80,702,000	12	80,700,600	100	100	24	186,732,500	40.00	30.18	
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		
		Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana saat pra, darurat dan pasca bencana oleh Forum TAGANA Kab. Temanggung	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

d.	Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan bencana dengan pembentukan Forum Kampung Siaga Bencana	desa	6	83.227.500	1	35.732.000	1	42,560,000	0	0	0	0	0	1	35,732,000	16.67	42.93	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97,98		
																Predikat	Sangat tinggi		
2	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																		
a.	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PSKS Terlantar	persen	100	1.150.244.700	100	183.426.639	100	237,330,000	204,589,800	100	200,504,483	100	98.00	100	383,931,122	100	33.38	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik	Prosentase Penyandang Disabilitas PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	persen	100	551.619.000	100	102.562.550	100	117,480,000	66,243,120	100	65,267,320	100	98.527	100	167,829,870	100	30.42	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial	Prosentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial	persen	100	249.825.000	100	35.648.050	100	53,760,000	8,294,600	100	7,663,050	100	92.39	100	43,311,100	100	17.34
Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	Presentase Korban Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi	persen	100	99.096.000	100	15.507.750	100	21,631,000	5,000,000	100	5,000,000	100	100	100	20,507,750	100	20.69
Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar	Anak terlantar, jalan an, berkebutuhan khusus, ABH dan Lansia terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial, Berbasis keluarga, Masyarakat dan Panti/Balai	persen	100	506.633.500	100	47.634.700	100	112,300,000	29,319,500	100	27,635,650	100	94.26	100	75,270,350	100	14.86

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Fasilitasi Home Care	Tertanganinya kasus-kasus keterlantaran	persen	100	260.000.000	0	0	40	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi DAK	Terlaksananya bantuan DAK dari Kemensos	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100	
																Predikat	Sangat tinggi	
3	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial																	
a.	Peningkatan kapasitas anak panti asuhan	terlatihnya ketrampilan anak panti/LKSA, tersalurnya bantuan alat untuk anak panti/LKSA, terlaksananya Porseni anak Panti/LKSA	anak	120	675.876.400	24	96.640.050	24	144,985,000	0	24	0	0	0	24	96,640,050	20.00	
	Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga	tercapainya peningkatan Kapasitas PSKS	orang	320	2.048.096.000	64	324.574.970	64	425,359,000	12,614,000	64	90	12,607,650	100	154	337,182,620	48.13	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang ditingkatkan kemampuannya dalam penanganan permasalahan sosial dan kesejahteraannya, dan terlaksananya kegiatan restorasi social	orang/orang/kegiatan	800	993.599.900	162	381.400.193	160	150,000,000	1,654,600	160	245	1,625,600	100	407	383,025,793	50.88		
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
4	Program penanganan fakir miskin																		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

a.	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH	Terfasilitasikannya melalui Pendampingan, Sosialisasi dan penjelasan Hak dan Kewajiban sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program RS-RTLH	Unit	250 0	772.504.500	832	135.683.950	1000	149,530,000	7,398,850	0	7,398,850	0	100	832	143,082,800	33.28	18.52	
	Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin	terlaksananya program pemberdayaan ekonomi produktif bagi 320 kpm keluarga miskin	Keluarga Miskin	161 6	255.074.000	336	72.228.500	110	81,370,000	2,838,300	110	2,838,300	100	100	446	75,066,800	27.60	29.43	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama	terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan tersalurkannya bantuan sosial stimulan bagi KUBE	KUBE FM	250	264.062.000	5	18.331.500	1	23,700,000	755,900	1	755,900	100	100	6	19,087,400	2.40	7.228	
	Kordinasi Penanganan Fakir Miskin	Terfasilitasi kegiatan Koordinasi Penanganan Fakir Miskin	Program	120	100.500.000	100	14.739.650	7	19,000,000	2,469,600	0	2,469,600	0	100	100	17,209,250	83.33	17.12	
	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terfasilitasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT)	KPM	150	441.906.000	100	78.130.410	46336	101,670,000	26,221,100	77570	26,215,200	100	99.977	77670	104,345,610	100	23.61	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
5	Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial																		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	Terpeliharanya TPM Prayudha Mudal MP Bambang Sugeng	bulan	60	481.355.000	12	94.609.062	12	96,355,000	84,186,000	12	82,188,000	100	97.627	24	176,797,062	40.00	36.73	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
6	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah																		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	%	167	24.800.000	34	4.998.600	33	4,800,000	2,577,600	33	2,577,000	100	99.98	67	7,575,600	40.12	30.55	
	Pengelolaan data kemiskinan	Terlaksananya Verval DKD	semester	10	2.736.401.000	2	429.848.538	2	600,000,000	530,659,200	2	505,560,029	100	95.27	4	935,408,567	40.00	34.18	
		Terlaksananya bimtek SIKS-Droid	Desa+Kecamatan	309		309		309			309	0	100	0	309	0	100		
		Terlaksananya pemutakhiran DTKS dan PSKS	Data	10		2		2			2	0	100	0	4	0	40.00		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

		Terlaksananya update Data peserta PBI JKN, APBD I dan APBD II	bulan	60		12		12			12	0	100	0	24	0	40.00		
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
7	Program pelayanan administrasi perkantoran																		
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	359.519.850	12	49.154.163	12	62,723,850	59,520,000	12	56,484,142	100	94.90	24	105,638,305	40.00	29.38	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan kebutuhan Alat Kebersihan dan honor petugas kebersihan	bulan	60	257.170.000	12	48.423.983	12	48,170,000	48,656,000	12	48,187,891	100	99.04	24	96,611,874	40.00	37.57	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya Biaya ATK	bulan	60	102.064.300	12	19.124.600	12	18,433,500	13,285,100	12	13,282,600	100	99.98	24	32,407,200	40.00	31.75	
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan biaya cetak dan penggandaan	bulan	60	80.513.000	12	14.997.400	12	14,453,000	14,453,000	12	13,017,400	100	90.07	24	28,014,800	40.00	34.8	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	77.453.000	12	14.314.325	12	14,453,000	9,987,000	12	9,970,500	100	99.83	24	24,284,825	40.00	31.35	
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya biaya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	13.588.000	12	2.520.000	12	2,428,000	2,354,000	12	2,220,000	100	94.31	24	4,740,000	40.00	34.88	
g.	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya Biaya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	bulan	60	245.754.670	12	36.631.000	12	44,890,670	29,330,000	12	23,756,000	100	81.00	24	60,387,000	40.00	24.57	
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	60	350.497.500	12	70.018.770	12	67,472,500	37,594,000	12	31,715,800	100	84.36	24	101,734,570	40.00	29.03	
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	pemenuhan biaya untuk perjalanan Dinas dalam Daerah	bulan	60	46.422.880	12	6.080.000	12	6,442,880	4,520,000	12	4,305,000	100	95.24	24	10,385,000	40.00	22.37	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

j.	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	pembayaran honor tenaga non pns, lembur pns dan non pns	bulan	60	448.077.970	12	5.185.900	12	412,887,570	452,034,000	12	430,658,057	100	95.27	24	435,843,957	40.00	97.27	
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	pembayaran honor tenaga keamanan 6 orang	bulan	60	126.000.000	12	0	12	126,000,000	127,440,000	12	116,619,889	100	91.51	24	116,619,889	40.00	92.56	
l.	Penilaian PAK	penilaian PAK Penyuluh Sosial	orang	35	102.370.200	7	14.042.900	7	19,992,000	1,910,000	7	1,230,000	100	64.40	14	15,272,900	40.00	14.92	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		
8	Program peningkatan sarana prasarana aparatur																		
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan gedung Kantor	%	100	248.170.000	100	48.340.000	0	48,170,000	0	0	0	0	0	100	48,340,000	100	19.48	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana peralatan gedung Kantor	%	100	199.088.000	100	24.000.000	0	24,088,000	0	0	0	0	0	100	24,000,000	100	12.05	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	60	139.088.000	12	24.753.000	12	24,088,000	14,526,000	12	14,150,500	100	97.41	24	38,903,500	40.00	27.97	
d.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	bulan	60	726.565.000	12	131.392.455	12	141,045,000	113,640,400	12	110,226,275	100	97.00	24	241,618,730	40.00	33.25	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor	bulan	60	99.271.000	12	16.500.000	12	19,271,000	6,925,000	12	6,915,000	100	99.86	24	23,415,000	40.00	23.59	
f.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	bulan	60	112.922.030	12	14.115.000	12	17,922,030	17,920,000	12	15,640,000	100	87.28	24	29,755,000	40.00	26.35	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	Sangat tinggi		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

9	Program peningkatan disiplin aparatur																		
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	stel	70	18.000.000	0	0	38	9,000,000	9,000,000	28	7,000,000	73.68	77.78	28	7,000,000	40.00	38.89	
	Total Program																		

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	96,85		
PREDIKAT																	Sangat tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	99,09		
PREDIKAT																	Akan Tercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial berupa:

- I. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
 2. Pengelolaan data kemiskinan
 3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 12. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 13. Penyediaan Jasa Pengamanan
 14. Penilaian PAK
 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 20. Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
 21. Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 22. Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial
 23. Operasional Rumah Perlindungan Sosial
 24. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik
 25. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial
 26. Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang
 27. Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar

28. Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga
 29. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga
 30. Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin
 31. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama
 32. Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 33. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan
- II. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
1. Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana
 2. Fasilitasi Home Care
 3. Fasilitasi DAK
 4. Peningkatan kapasitas anak panti asuhan
 5. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH
 6. Kordinasi Penanganan Fakir Miskin
 7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 8. Pengadaan peralatan gedung kantor

Adapun capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan tersebut antara lain dikarenakan adanya refocusing anggaran dan review targetnya dan tidak adanya DAK dari Kementerian Sosial karena refocusing di tingkat kementerian. Dan dampak dari hal tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan layanan sosial antara lain penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar sebatangkara yang menjadi sasaran layanan home care, tidak terlaksananya rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni, belum terbangunnya ruang pelayanan data, dan beberapa pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Sosial. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai 75,45%, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Capaian Kinerja: 1,79% kategori Kurang;
2. Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS dan Capaian Kinerja :100,00 % kategori Memuaskan;
3. Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi ; Capaian Kinerja 100,00 % kategori Memuaskan;
4. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja 100 % dengan kategori Memuaskan;

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Kemiskinan	%	9,36	8,85	8,34	7,83	7,32	9,42	9,96	-	-	-	63,93	AT
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,96	9,91	-	-	-	1,79	UK
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,20	-	-	-	100	TT
4	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
5	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	%	5	5	6	6,5	7	7,04	7,83	-	-	-	78,34	AT
7	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
8	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT
9	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	TT

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos													
10	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100				100	TT
11	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	%	0,11	0,1	0,13	0,16	0,19	0,33	0,09				47,90	AT
12	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	48	48	48	46,23	83,17				100	TT
13	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00				100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 terdiri dari:
 - a. Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social.
 - b. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan social.
 - c. Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social.
 - d. Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos.
 - e. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos.
 - f. Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos.
 - g. Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial
 - h. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
 - i. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
2. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah mempunyai Rumah Perlindungan Sosial yang menunjang ketercapaian indikator tersebut di mana pelayanan RPS sudah menginjak tahun ke empat dengan progress peningkatan pelayanan yang semakin baik. Pada tahun 2019 mendapat bantuan keuangan dari APBD I untuk pembangunan gedung RPS sehingga terwujud sarana dan prasarana yang semakin memadai untuk pelayanan. Selain itu kelima indikator sasaran tersebut juga merupakan komponen indikator SPM sosial yang mempunyai target 100 %, Kemudian adanya jejaring kerja ditingkat Kabupaten dan Provinsi, mempunyai Sakti Peksos, pendamping disabilitas, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial harus ikut

berpartisipasi dalam penanganan PMKS untuk mengembalikan fungsi sosialnya. Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2020, Ketersediaan logistik dan ketersediaan SDM untuk pendampingan psikososial bagi korban bencana, Ada sebagian usulan kegiatan yang berasal dari hasil Musrenbang, Kegiatan verval dilakukan setahun 2 kali dan adanya sumber anggaran lain selain APBN sebagai duplikasi kegiatan BPNT yang didanai oleh APBD dan APBDes, apalagi di masa pandemic terdapat bantuan dari berbagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin maupun terdampak covid 19.

3. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Ketegasan dari pengambil kebijakan terutama di tingkat desa yang merasa enggan mengeluarkan warga dari data kemiskinan dengan berbagai factor seperti kedekatan, unsur politis dan lainnya, Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa, Karakteristik masyarakat miskin yang cenderung mempunyai sikap mental pasrah, merasa nyaman dengan bantuan social yang selama ini diterima, Masih terjadinya ketidaktepatan sasaran beberapa bansos. Dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Singgah masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana antara lain alat bantu disabilitas dan pekerja sosial dan beberapa sarpras penyesuaian gedung baru. Untuk penerima manfaat KUBE dan UEP, bantuan sosial masih dirasa kecil oleh penerima dan sangat berharap dapat ditambah besaran bantuan UEP dan KUBE di masa berikutnya.
4. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah harus tersedianya alat bantu dan SDM pekerja Sosial di dalam UPT Rumah Singgah, adanya pendampingan/ psikososial bagi korban bencana, adanya kenaikan anggaran bantuan permakanan anak panti per anak sehingga terpenuhi akan kebutuhan gizi, perlunya sosialisasi rehabilitasi sosial

berbasis keluarga, masyarakat, perlu peningkatan sarana dan prasana RPS untuk disesuaikan dengan gedung yang baru, peningkatan kapasitas (CB), pelatihan ketrampilan, pemberian bantuan/ stimulan, monitoring dan evaluasi, dan untuk TMP perlunya peningkatan sarana bangunan.

5. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 terdiri dari:

a. Angka Kemiskinan.

b. Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya intervensi dari semua sumber dana baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, dalam menentukan sasaran KK miskin menggunakan DTKS, ada sebagian usulan kegiatan BANSOS UEP yang berasal dari hasil Musrenbang.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pandemi covid sehingga jumlah penduduk miskin meningkat, bantuan sosial UEP masih dirasa kecil oleh penerima.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya review terhadap target tahun 2020 dengan pertimbangan agar perhitungan angka kemiskinan lebih realistis terkait dampak covid 19, untuk penerima manfaat KUBE dan UEP, bantuan sosial masih dirasa kecil oleh penerima dan sangat berharap dapat ditambah besaran bantuan UEP dan KUBE di masa berikutnya.

c. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peran serta berbagai sector dalam penanganan RTLH antara lain dari pemerintah pusat dan daerah, CSR, pemerintah desa dan mandiri.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah RTLH yang ditangani ada yang belum masuk dalam data kemiskinan dikarenakan data awal pada tahun 2018 perhitungannya berbeda dan dari jumlah penanganan

6.832 tidak seluruhnya bersumber dari BDT.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya review terhadap target awal tahun 2018 dengan pertimbangan agar perhitungan penanganan RTLH bisa terukur dengan baik.

2.2.2.Data Pokok

A. Aspek Kesejahteraan

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya nilai rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.² konsumsi

setara dengan 2.100 kalori per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara indikator keluarga fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI (Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK / 2013), yaitu :

1. Tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;

3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meteran;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

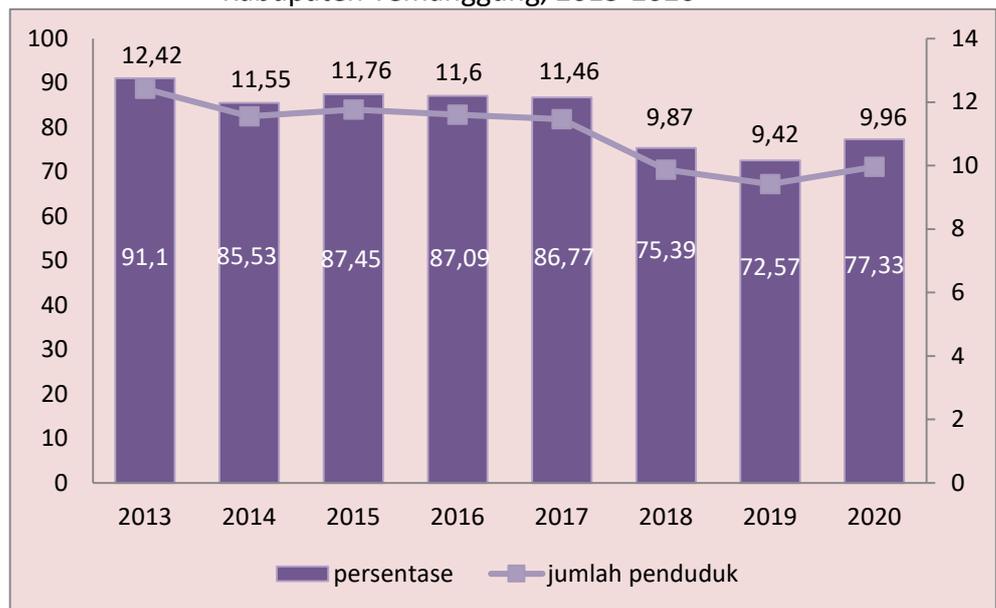
Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk miskin	87.450	87.090	86.770	75.390	72.570	77.330
2.	Jumlah penduduk	743.622	750.775	757.155	763829	770.382	794.055
3.	Persentase Penduduk Miskin	11,76	11,6	11,46	9,87	9,42	9,96

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun terjadi kenaikan angka penduduk miskin di Tahun 2020.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013-2020



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2020

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan pada Tahun 2019 menjadi 9,36% dalam RPJMD 2018-2023. Capaian Tahun 2019 adalah 9,42% dengan status akan tercapai. Sedangkan pada Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi COVID-19, target mengalami perubahan menjadi 11,6%, kemudian terealisasi 9,96% dengan status telah tercapai.

Angka kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 7 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada Tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih fluktuatif, namun cenderung menurun menjadi 9,42 persen pada tahun 2019. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2015, tingkat kemiskinan sedikit meningkat dibanding sebelumnya, namun sejak Tahun 2015, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Akan tetapi di Tahun 2020, baik jumlah maupun persentase penduduk

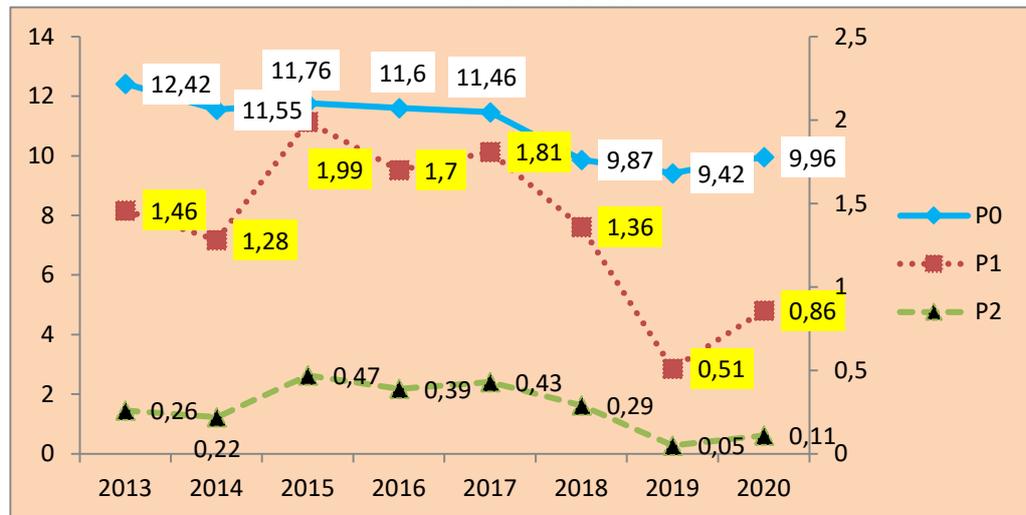
miskin mengalami kenaikan menjadi 77.330 jiwa atau secara persentase naik sebesar 0,54 persen.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,
2013 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2013-2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Kinerja penurunan paling besar pada Tahun 2018-2019, yaitu sebesar 0,85. Dan naik 0,35 pada Tahun 2020. Secara keseluruhan antara Tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi penurunan sebesar 1,13. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2015-2020 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten temanggung tahun 2015-2020 dibandingkan dengan Jawa Tengah, ketimpangan pengeluaran diantara

penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,47 menjadi 0,05 pada tahun 2019, namun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,11. Kemungkinan adanya kenaikan tersebut karena adanya dampak Pandemi COVID-19.

2. Bidang Sosial

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. (Menurut : Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir

Miskin No.03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan).

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011 sampai akhir 2019 menurun dari 36.853 unit menjadi 24.209 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 12.644 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan Tahun 2019.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni Tahun 2015-2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni
 Kabupaten Temanggung, 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	36.853	35.007	33.320	26.624	24.209	20.058
2.	Jumlah rumah tinggal	194.116	196385	198.785	201.105	202.391	202.391
3.	Persentase	18,98	17,82	16,76	13,24	11,96	9,91

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015 sampai akhir 2020 menurun dari 36.853 unit menjadi 20.058 unit. Dari Tahun 2019 hingga 2020 terjadi penurunan yang semula 24.209 menjadi 20.058. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 4.151 unit menjadi rumah layak huni sampai dengan Tahun 2020. Jumlah RTLH di Tahun 2019 yang sejumlah 24.209 di intervensi dari berbagai sumber antara lain dari CSR, BSPS, DAK, Dana Desa, Baznas dan TJSL sebanyak 4.151 unit. Penanganan RTLH pada Tahun 2020 yang bersumber dari APBD II tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19, demikian juga yang bersumber dari Kementerian Sosial juga tidak ada realisasi di Tahun 2020 karena Pandemi COVID-19.

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015-2019

NO	KECAMATAN	ANASIS BD	SUMBER DANA PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2019									TOTAL TERBANTU 2015-2018	TOTAL TERBANTU S/D 2019	SISA BELUM TERBANTU
			APBD	ANKEU PRO	APBN	APBDes	BSPS	CSR	ORMAS /LEMBAGA	SWADAYA	LAINNYA			
1	PARAKAN	1.492	6	32	0	5	28	0	0	3	0	405	74	1.013
2	KLEDUNG	1.376	4	33	0	1	0	2	2	0	0	452	42	882
3	BANSARI	1.452	18	25	0	10	148	8	0	4	0	699	213	540
4	BULU	2.483	48	15	0	21	83	5	1	5	0	969	178	1.336
5	TEMANGGUN	804	0	1	0	0	20	0	0	0	0	262	21	521
6	TLOGOMULY	1.086	0	9	0	8	20	5	1	1	0	427	44	615
7	TEMBARAK	1.401	8	37	5	29	45	3	1	0	0	314	128	959
8	SELOPAMPAN	933	31	0	10	4	48	0	1	1	0	604	95	234
9	KRANGGAN	1.171	22	22	1	3	13	1	0	10	1	411	73	687
10	PRINGSURAT	1.723	38	0	0	31	73	1	1	39	1	678	184	861
11	KALORAN	2.979	32	3	7	6	48	7	0	0	0	528	103	2.348
12	KANDANGAN	2.821	34	27	0	34	14	0	1	0	0	373	110	2.338
13	KEDU	1.115	14	11	0	0	0	5	0	0	0	524	30	561
14	NGADIREJO	4.104	18	46	0	64	171	10	6	1	5	989	321	2.794
15	JUMO	1.816	46	0	0	40	0	0	1	0	0	495	87	1.234
16	GEMAWANG	2.411	26	20	7	23	10	8	3	1	1	408	99	1.904
17	CANDIROTO	2.177	69	39	16	36	0	0	0	1	0	547	161	1.469
18	BEJEN	1.420	23	22	17	24	19	0	0	0	0	231	105	1.084
19	TRETEP	2.149	17	16	9	35	22	0	0	10	0	225	109	1.815
20	WONOBOYO	1.940	37	36	10	63	53	0	2	37	0	688	238	1.014
JUMLAH		36.853	491	394	82	437	815	55	20	113	8	10.229	2.415	24.209

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	RTLH
1	BANSARI	441
2	BEJEN	935
3	BULU	1.123
4	CANDIROTO	1.698
5	GEMAWANG	1.662
6	JUMO	1.189
7	KALORAN	1.818
8	KANDANGAN	2.314
9	KEDU	427
10	KLEDUNG	411
11	KRANGGAN	598
12	NGADIREJO	3.705
13	PARAKAN	955
14	PRINGSURAT	943
15	SELOPAMPANG	321

NO	KECAMATAN	RTLH
16	TEMANGGUNG	678
17	TEMBARAK	558
18	TLOGOMULYO	655
19	TRETEP	1.446
20	WONOBOYO	1.339
	Total	23.216

Sumber:

Dinas Sosial 2020, data diolah

2. Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial

Sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, disebutkan bahwa Rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan adalah rehabilitasi yang bersifat sementara sampai dengan adanya penanganan lanjut melalui balai rehabilitasi sosial yang sesuai (pengelolaan yang dilakukan masih dasar bersifat rujukan). Upaya rehabilitasi sosial merupakan satu bentuk layanan yang harus dilaksanakan untuk semua kasus karena jika tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa. Demikian pula dengan terjadinya Pandemi COVID-19 ini banyak penyandang disabilitas yang juga terdampak kehidupannya, kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatannya. Untuk itu dilakukan upaya pencegahan untuk menolong kehidupan para penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan sosial dari berbagai pihak seperti bantuan sosial Kemensos, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini” Temanggung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra “Wyata Guna” Bandung. Dan Kabupaten Temanggung terpilih sebagai salah satu sasaran penerima bantuan terdampak Pandemi COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Jenis bantuan yang digelontorkan bagi penyandang disabilitas diluar bantuan reguler program Kemensos yang diterimakan selama Pandemi

COVID-19 berupa sembako. Adapun bantuan sembako dari BBRSPDI “Kartini “ Temanggung diberikan kepada 201 penyandang disabilitas, dan dari BRSPDN “ Wyata Guna “ Bandung diberikan kepada 13 orang penyandang disabilitas netra.

Untuk memperoleh Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial maka digunakan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti social di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Luar Panti Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	214	265	404	321	349	591
	- disabilitas terlantar	40	44	40	40	247	536
	- anak terlantar	72	117	167	90	54	41
	- lanjut usia terlantar	0	5	14	7	8	7
	- tuna sosial diluar panti sosial	102	99	183	184	40	7
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang membutuhkan	20.685	20.463	29.395	27.277	26.440	26.883

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	rehabilitasi sosial						
	- disabilitas terlantar	6.822	6.715	6.275	5.970	5.186	5.685
	- anak terlantar	2.797	2.524	1.632	865	609	609
	- lanjut usia terlantar	10.479	10.652	21.030	20.134	20.561	20.651
	- tuna sosial diluar panti sosial	587	572	458	308	84	28
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial diluar panti sosial	1.03	1.30	1.37	1.18	1,31	2,20

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dari Tahun 2015 - 2020 menunjukkan adanya peningkatan, pelayanan rehabilitasi sosial dasar cenderung fluktuatif dan pada Tahun 2018 cakupannya lebih rendah pada kurun 3 (tiga) tahun terakhir (1,18%). Pada triwulan IV tahun 2020 baru mencapai 2,20 %. Hal ini menunjukkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar meningkat sejalan dengan slogan Kementerian Sosial Republik Indonesia Humanis ,Adaptif, Dedikatif, Inklusif dan Responsif. Kondisi tersebut disinyalir juga merupakan dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19 , dimana banyak keluarga yang tiba-tiba menurun pendapatan ekonominya dan tidak bisa lagi merawat dan mengawasi anggota keluarganya yang notabene merupakan penyandang disabilitas sehingga pergi menggelandang dan terlantar di Kota Temanggung.

*Tabel 3.2
Data Disabilitas terlantar yang ditangani Tahun 2015-2020
S/D triwulan IV*

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	2	9	1	28
2	Kledung	-	4	-	-	3	5
3	Bansari	3	-	-	1	-	3
4	Bulu	4	5	2	-	-	61
5	Temanggung	5	5	2	4	2	82
6	Tlogomulyo	2	1	-	-	-	6

7	Tembarak	2	2	1	4	-	77
8	Selopampang	3	2	1	4	1	5
9	Kranggan	1	3	2	2	-	34
10	Pringsurat	2	1	1	-	1	30
11	Kaloran	3	1	1	-	3	14
12	Kandangan	1	2	1	3	-	64
13	Kedu	1	1	1	2	1	37
14	Ngadirejo	2	3	-	5	1	47
15	Jumo	1	1	-	1	-	10
16	Gemawang	2	2	-	-	-	3
17	Candiroto	1	1	-	2	-	3
18	Bejen	1	1	-	-	3	2
19	Tretep	1	2	-	1	-	-
20	Wonobojo	3	1	-	-	-	1
21	Luar Daerah						24
	JUMLAH	40	44	40	40	15	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 3.3
Data Anak Terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D Triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	2	6	6	56	-	1
2	Kledung	-	4	5	-	-	1
3	Bansari	3	-	-	-	-	1
4	Bulu	4	5	2	4	-	4
5	Temanggung	5	5	5	2	-	2
6	Tlogomulyo	2	1	26	-	-	2
7	Tembarak	2	2	5	-	22	0
8	Selopampang	3	2	5	1	2	0
9	Kranggan	1	3	5	-	-	2
10	Pringsurat	2	1	55	-	-	2
11	Kaloran	3	1	1	2	2	7
12	Kandangan	1	5	5	5	1	3
13	Kedu	1	26	1	2	-	4
14	Ngadirejo	2	5	5	2	-	2
15	Jumo	1	5	6	3	-	2
16	Gemawang	2	5	10	3	-	0
17	Candiroto	1	55	-	-	-	0
18	Bejen	1	1	10	4	2	0
19	Tretep	1	2	15	3	-	0
20	Wonobojo	3	1	-	3	1	4
21	Luar daerah						4
	JUMLAH	72	177	167	90	30	41

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 3.4
Data Lansia terlantar yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	-	1	2	-	1	-
2	Kledung	-	-	-	-	1	-
3	Bansari	-	-	-	-	-	-
4	Bulu	-	1	2	-	-	-
5	Temanggung	-	1	2	-	10	5
6	Tlogomulyo	-	-	-	-	7	-
7	Tembarak	-	-	1	1	7	-
8	Selopampang	-	-	1	-	-	-
9	Kranggan	-	-	2	2	1	-
10	Pringsurat	-	1	1	1	-	-
11	Kaloran	-	-	1	-	2	-
12	Kandangan	-	-	1	-	8	-
13	Kedu	-	1	1	-	-	-
14	Ngadirejo	-	-	-	-	2	-
15	Jumo	-	-	-	1	-	-
16	Gemawang	-	-	-	-	-	-
17	Candiroto	-	-	-	2	1	-
18	Bejen	-	-	-	-	-	1
19	Tretep	-	-	-	-	-	-
20	Wonobojo	-	-	-	-	1	-
21	Luar daerah						1
	JUMLAH		5	14	7	38	5

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 3.5
Data Tuna Sosial Terlantar Luar Panti yang ditangani
Tahun 2015-2020 S/D triwulan IV

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	10	6	6	2	-	1
2	Kledung	6	4	5	1	-	-
3	Bansari	10	-	-	3	-	-
4	Bulu	1	5	2	2	-	-
5	Temanggung	2	5	5	2	4	-
6	Tlogomulyo	2	1	26	3	-	-
7	Tembarak	5	2	5	4	-	1
8	Selopampang	26	2	5	1	2	-
9	Kranggan	5	3	5	10	-	-
10	Pringsurat	5	1	55	6	-	-
11	Kaloran	3	1	1	10	3	1
12	Kandangan	1	5	5	1	3	-
13	Kedu	25	26	1	2		-
14	Ngadirejo	5	5	5	2	4	-
15	Jumo	1	5	6	2	4	-
16	Gemawang	5	5	10	24	1	-
17	Candiroto	6	55	-	23	-	-
18	Bejen	10	1	10	2	-	-
19	Tretep	1	2	15	0	-	-
20	Wonobojo	11	1	-	0	-	-

21	Luar Daerah	34	24	23	53	19	4
22	Tidak Diketahui Alamat	45	46	43	31	40	-
	Jumlah	102	99	183	189	40	7

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial

Definisi korban bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2015-2020 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan
Perlindungan Sosial
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	110	80	119	66	55	58
2.	Jumlah korban bencana	110	80	119	66	55	58
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Korban bencana adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban

bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kejadian Bencana Tahun 2020 s.d TW IV

NO	TGL	JENIS BENCANA	LOKASI BENCANA		JML KK
			DESA	KECAMATAN	
1	23/02/2020	Tanah Longsor	Batursari	Candiroto	1
2	29/02/2020	Tanah Longsor	Dangkel	Parakan	2
3	02/03/2020	Kebakaran	Banjarsari	Ngadirejo	2
4	06/03/2020	Angin Ribut	Wonotirto	Bulu	1
5	07/03/2020	Tanah Longsor	Banjarsari	Bejen	2
6	23/03/2020	Angin Ribut	Kledung	Kledung	1
7	24/03/2020	Angin Ribut	Parakan Kauman	Parakan	7
8	27/03/2020	Angin Ribut	Tegalroso	Parakan	1
9	03/04/2020	Banjir	Parakan Wetan	Parakan	1
10	14/04/2020	Kebakaran	Muntung	Candiroto	1
11	14/04/2020	Kebakaran	Kentengsari	Candiroto	1
12	15/04/2020	Kebakaran	Kemloko	Tembarak	1
13	29/04/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
14	04/05/2020	Angin Ribut	Wonosari	bulu	2
15	24/05/2020	Kebakaran	Mento	Candiroto	2
16	10/06/2020	Tanah Longsor	Tlogopucang	Kandangan	2
17	02/07/2020	Kebakaran	Kedu	Kedu	2
18	13/07/2020	Kebakaran	Malebo	Kandangan	1
19	12/08/2020	Angin Ribut	Kebondalem	Bejen	2
20	19/08/2020	Kebakaran	keblukan	Kaloran	1
21	24/07/2020	Kebakaran	Tleter	Kaloran	1
22	25/08/2020	Kebakaran	Kebonsari	Temanggung	1
23	07/09/2020	Kebakaran	Tening	Wonoboyo	4
24	09/09/2020	Kebakaran	Campursari	Ngadirejo	2
25	10/09/2020	Pohon Tumbang	keblukan	Kaloran	1
26	09/10/2020	kebakaran	dlimoyo	Ngadirejo	2
27	23/10/2020	Pohon Tumbang	Gentan	Kranggan	1
28	28/10/2020	Kb Tanah Longsor	Bejen	Bejen	1

NO	TGL	JENIS BENCANA	LOKASI BENCANA		JML KK
			DESA	KECAMATAN	
29	07/11/2020	Tanah Longsor	Bejen	bejen	1
30	16/11/2020	Angin Ribut	Jlegong	Bejen	1
31	19/11/2020	Tanah Longsor	Wonoboyo	Wonoboyo	1
32	27/11/2020	Kebakaran	Jampiroso	Temanggung	2
33	02/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
34	05/12/2020	Tanah Longsor	Tuksari	Kledung	2
35	07/12/2020	Tanah Longsor	Tleter	Kaloran	1
36	08/12/2020	Angin Ribut	Banjarsari	Bejen	1
37	10/12/2020	Tanah Longsor	pagergunung	Pringsurat	1
JUMLAH KK TERDAMPAK					58

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, bencana kebakaran menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

4. Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial

Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Penanganan bagi anak terlantar salah satunya melalui Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah) Di Kabupaten Temanggung anak terlantar di dalam panti tersebar di 8 Panti Asuhan.

Persentase anak terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan bantuan jaminan sosial adalah anak dari keluarga miskin dan/atau anak yang tidak mempunyai ayah dan/atau ibu (Yatim Piatu) yang tinggal di panti dan mendapatkan bantuan jaminan permakanaan anak panti.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapat bantuan jaminan sosial dibagi jumlah anak terlantar dalam panti dikali 100%.

Tabel 5.1
Persentase Anak Yatim Piatu Terlantar Dalam Panti Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan social	283	283	371	371	371	381
2.	Jumlah anak yatim piatu terlantar dalam panti social	283	283	371	371	371	381
3.	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak terlantar dalam panti cenderung naik, disebabkan perluasan daya tampung anak dalam sebuah panti dan adanya penambahan jumlah panti.

Validasi data anak panti dilakukan (N-1) sebagai dasar *targetting* sasaran anak panti yang mendapatkan perlindungan sosial pada tahun mendatang. Pada Tahun 2020 dengan terjadinya Pandemi COVID-19, pada Bulan Maret s/d Mei 2020 sebagian besar anak-anak panti pulang ke keluarga atau wali masing-masing dan hanya beberapa yang benar-benar sudah tidak punya keluarga yang tetap tinggal di panti. Hal ini mempengaruhi penyerapan bansos permakanaan anak panti, di mana pada 3 bulan tersebut tidak akan dicairkan. Berikut data anak Panti se-Kabupaten Temanggung :

Tabel 5.2
Data Anak Panti
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Triwulan IV

No	Nama Panti	Jml Anak
1.	PA. Betlehem	37
2.	PAY Muhamadiyah Putra	40
3.	PAY Muhamadiyah Putri	52
4.	PA. Darul Hadlonah Putra	25
5.	PA Darul Hadlonah Putri	51
6.	PA. Darul Falah	51
7.	PA. Suryani Sunan Plumbon	60
8.	PA. Darul Mutaqin	65
	JUMLAH	381

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Temanggung, 2020

5. Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial adalah seseorang yang berusia 60 tahun keatas dan miskin, karena keterbatasan fisiknya sehingga mengakibatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga diperlukan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial tersebut agar tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang maupun pangan) sehingga dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup secara wajar (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Rumus jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial di bagi Jumlah lanjut usia terlantar non potensial dikali 100 %

Realisasi persentase lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2015-2020 sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Persentase Lanjut Usia Terlantar Non Potensial Yang
Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial yang mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan social	289	289	400	400	539	600
2.	Jumlah lanjut usia terlantar non potensial	5.515	5.606	8.480	8.018	7.658	7.658
3.	Persentase	5,24	5,16	4,72	4,99	7,04	9,66

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar non potensial mengalami kenaikan cukup besar terjadi pada Tahun 2015 – 2020. Hal ini didukung pelayanan jaminan hidup untuk Lanjut Usia Terlantar, disabilitas berat yang sebagian besar *bed riden*.

Tabel 6.2
Data Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Bansari	33	
2	Bejen	36	
3	Bulu	44	
4	Candiroto	42	
5	Gemawang	16	
6	Jumo	24	
7	Kaloran	28	
8	Kandangan	48	
9	Kedu	34	
10	Kledung	23	
11	Kranggan	43	
12	Ngadirejo	39	
13	Parakan	25	
14	Pringsurat	50	
15	Selopampang	27	
16	Temanggung	24	
17	Tembarak	17	
18	Tlogomulyo	22	
19	Tretep	7	
20	Wonobojo	18	
JUMLAH		600	

6. Persentase anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah anak dan lansia terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak dan lansia terlantar berdasarkan laporan kejadian dikali 100%.

Realisasi persentase rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari

Tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak terlantar dan lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan social	62	122	181	97	61	48
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	-	5	14	7	8	7
	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang didampingi masuk dalam PPSLU (Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia)	-	5	14	7	8	7
	Jumlah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang ditangani	-	14	6	7	-	27
	Jumlah ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan pendampingan	-	14	6	7	-	27
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang di tangani	-	35	37	10	23	10
	Jumlah AMPK (Anak memerlukan perlindungan khusus) yang mendapatkan Pendampingan	-	35	37	10	23	10
	Jumlah anak terlantar yang di -tangani	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak)	52	53	54	23	20	4
	Jumlah Anak terlantar yang ditangani	20	15	70	50	10	41
	Jumlah Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	20	15	70	50	10	41
	Presentase (%)	-	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah anak dan lansia terlantar terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2017 sebanyak 181 orang. Lansia terlantar di Kabupaten Temanggung didampingi untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU), sedangkan anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil assesmet kebutuhan

penanganan. Pada Tahun 2020 kasus anak dan lansia mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2019, hal ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga yang mengalami penurunan, hal ini juga berdampak kepada munculnya kasus anak dari berbagai kluster (Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak memerlukan Perlindungan Khusus, dan Anak Terlantar), juga munculnya kasus lansia terlantar.

Tabel 7.2
Data Lanjut, Terlantar dan Anak terlantar
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial
Tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	LUT	ABH	AMPK	AT
1	Temanggung	3	2	1	0
2	Tlogomulyo	1	2	0	0
3	Kranggan	0	2	0	0
4	Tembarak	0	0	0	0
5	Selopampang	0	0	0	0
6	Pringsurat	0	1	1	0
7	Kaloran	0	2	1	4
8	Parakan	0	1	0	0
9	Bansari	1	1	0	0
10	Kledung	0	0	1	0
11	Kedu	0	4	0	0
12	Bulu	0	1	2	0
13	Kandangan	0	2	1	0
14	Candiroto	0	0	0	0
15	Bejen	1	0	0	0
16	Jumo	0	1	1	0
17	Gemawang	0	0	0	0
18	Tretep	0	0	0	0
19	Wonobojo	0	3	1	0
20	Ngadirejo	0	2	0	0
21	Luar Daerah	1	3	1	0
	JUMLAH TOTAL	7	27	10	4

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos

Sesuai UU Kesos 11 Tahun 2009 yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini

dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Persentase Penyandang Disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial dibagi jumlah penyandang disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial melalui keluarga, masyarakat dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1

Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	40	44	40	40	247	536
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi social	40	44	40	40	247	536
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari data yang tertuang dalam Tabel 8.1 diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang

disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 8.2
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2020 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Parakan	28
2	Kledung	5
3	Bansari	3
4	Bulu	61
5	Temanggung	82
6	Tlogomulyo	6
7	Tembarak	77
8	Selopampang	5
9	Kranggan	34
10	Pringsurat	30
11	Kaloran	14
12	Kandangan	64
13	Kedu	37
14	Ngadirejo	47
15	Jumo	10
16	Gemawang	3
17	Candiroto	3
18	Bejen	2
19	Tretep	
20	Wonoboyo	1
	Luar Daerah	24
	JUMLAH TOTAL	536

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

8. Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Penyandang masalah sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos digunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi jaminan sosial dibagi tuna sosial yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos dikali 100%.

Realisasi persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1

Persentase Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Melalui Rumah Perlindungan Sosial dan Panti/Barehsos Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	102	99	183	184	182	77
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 9.1. di atas, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini karena di tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan razia terhadap gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Mulai tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial, capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Meskipun dari aspek kualitas SDM perlu adanya peningkatan kapasitas kompetensinya, mengingat SDM yang ada di Rumah Perlindungan Sosial belum ada tenaga Pekerja Sosial profesional yang menjabat secara fungsional dan pelaksanaannya masih di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan maka diperlukan adanya jabatan fungsional Pekerja Sosial Terampil dan Ahli untuk menangani klien di Rumah Perlindungan Sosial. Dan untuk lebih optimal seharusnya Rumah Perlindungan Sosial harus berdiri sendiri sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT). Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung RPS dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Adapun pelayanan Rumah Pelayanan Sosial sebagai shelter pertama bagi penyandang disabilitas terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebelum mereka dirujuk atau dipertemukan dengan keluarganya.

Tabel 9.2
Data Sebaran Klien RPS Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bansari	Temanggung		
2	Bejen	Temanggung	1	
3	Bulu	Temanggung		
4	Candiroto	Temanggung	2	
5	Gemawang	Temanggung	1	
6	Jumo	Temanggung	1	
7	Kaloran	Temanggung	1	
8	Kandangan	Temanggung		
9	Kedu	Temanggung		
10	Kledung	Temanggung	1	
11	Kranggan	Temanggung		
12	Ngadirejo	Temanggung	1	
13	Parakan	Temanggung	4	
14	Pringsurat	Temanggung	1	
15	Selopampang	Temanggung	1	
16	Temanggung	Temanggung	12	
17	Tembarak	Temanggung	3	
18	Tlogomulyo	Temanggung		
19	Tretep	Temanggung		
20	Wonobojo	Temanggung		
21	Luar daerah		35	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		13	Tidak teridentifikasi
JUMLAH TOTAL KLIEN			77	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

9. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan penutan bagi keluarga lainnya.
5. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan sosial di lingkungannya.
6. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga pemberdayaan merupakan uaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk mengembangkannya. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS perorangan dan keluarga yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS perorangan dan keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.1
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243
2	Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	250	582	90	130	162	243
	-Pekerja Sosial Profesional	-	-	-	-	-	182
	-PSM	170	495	8	43	60	36

	- Tagana	50	50	50	50	55	-
	- Keluarga Pioner	-	-	-	-	20	-
	- WPKS	10	10	5	10	-	5
	-Penyuluh Sosial	-	7	7	7	7	20
	- TKSK	20	20	20	20	20	
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalan dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial melalui keikutsertaan mereka dalam usaha kegiatan Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 243 orang terdiri dari 20 orang TKSK, 36 orang Tagana, dan 5 orang Penyuluh Sosial dan 182 PSM.

Tabel 10.2

Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis PSKS	Kecamatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Candiroto	11
		Bansari	3
		Kaloran	14

		Kandangan	19
		Tlogomulyo	12
		Kranggan	27
		Jumo	13
		Tembarak	13
		Pringsurat	18
		Bulu	22
		Selopampang	13
		Tretep	5
		Kedu	12
2	TAGANA	Kab. Temanggung	36
3	Penyuluh Sosial	Kab. Temanggung	7
4	TKSK	Kab Temanggung	20

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Tabel 10.3

Data Dukung Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Masyarakat dan Lembaga dalam usaha Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Jenis PSKS		Kecamatan	Jumlah
1	Karang Taruna	1.	Candirototo	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14
		20.	Gemawang	10
2	IPSM	1.	Candirototo	14
		2.	Bansari	13
		3.	Kaloran	14
		4.	Kandangan	16
		5.	Tlogomulyo	12
		6.	Kranggan	13
		7.	Jumo	13
		8.	Tembarak	13
		9.	Pringsurat	14
		10.	Bulu	19
		11.	Selopampang	12
		12.	Tretep	11
		13.	Kedu	14
		14.	Wonoboyo	13
		15.	Parakan	16
		16.	Ngadirejo	20
		17.	Temanggung	25
		18.	Kledung	13
		19.	Bejen	14
		20.	Gemawang	10

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

10. Cakupan Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (FK PSM, KT, WKSBM, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS, Dunia Usaha) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting karena dapat digunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya masalah-masalah kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan selain dilihat dari sisi manusia atau masyarakat itu dalam hal mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran dirinya, juga dilihat dari potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka upaya tersebut diatas menjadi sangat penting untuk memberdayakan potensi yang ada dan tumbuh dimasyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Yaitu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Upaya memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat dan melindungi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. (Wikipedia Bahasa Indonesia)

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 , definisi dari potensi sumber kesejahteraan sosial adalah :

1. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah system kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan

hukum/tidak berbadan hukum.

6. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
7. Dunia Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha industri/produk barang/jasa dan BUMN, BUMD dan wirausahawan serta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibagi PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial dikali 100%.

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam
Usaha Kesejahteraan Sosial
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial	141	114	90	96	64	50
	FK PSM	30	21	10	5	30	20
	KT	30	11	-	5	3	20
	WKSBM	71	72	70	76	2	-
	LK3	1	1	1	1	-	1
	LKKS	1	1	1	1	1	1
	LKS	-	-	-	-	8	-
	LKSA	8	8	8	8	-	8
	Dunia Usaha	-	-	-	-	20	-
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial tahun 2020 sejumlah 40 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FK PSM.

Dibandingkan dengan Tahun 2019, pemberdayaan masyarakat dan lembaga mengalami penurunan yang drastis, hal ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19, beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial dan *refocusing* anggaran, namun demikian pelayanan usaha kesejahteraan sosial tetap dilaksanakan sebagai berikut. Pemberdayaan

yang dilakukan Karang Taruna tingkat Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kecamatan. Kedua lembaga ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa dalam rangka ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana sosial akibat COVID-19 dan pendampingan pencairan bantuan sosial (BPNT dan JPS) , sementara itu LK3 dan LKSA tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.

Sedangkan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Masyarakat dan Kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 sejumlah 50 lembaga terdiri dari 20 FKKT, 20 FKPSM, 1 LK3, 1 LKKS, dan 8 LKSA.

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan dengan:

1. Upaya pemberdayaan harus terarah (targeted);
2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran;
3. Menggunakan pendekatan kelompok;
4. Berkesinambungan;

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek pembangunan. Contoh mudahnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, melaksanakan dan menikmati hasilnya.

Tabel 11.2

Data Potensi Sumber Kesehatan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	FIKPSM	KT	LK3	LKSA
1	Bansari	1	1	-	-
2	Bejen	1	1	-	-
3	Bulu	1	1	-	1
4	Candiroto	1	1	-	-
5	Gemawang	1	1	-	-

6	Jumo	1	1	-	-
7	Kaloran	1	1	-	-
8	Kandangan	1	1	-	-
9	Kedu	1	1	-	-
10	Kledung	1	1	-	-
11	Kranggan	1	1	-	-
12	Ngadirejo	1	1	-	-
13	Parakan	1	1	-	-
14	Pringsurat	1	1	-	1
15	Selopampang	1	1	-	1
16	Temanggung	1	1	1	4
17	Tembarak	1	1	-	1
18	Tlogomulyo	1	1	-	-
19	Tretep	1	1	-	-
20	Wonoboyo	1	1	-	-
JUMLAH		20	20	1	8

11. Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. (Menurut : UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. (Menurut: UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. (menurut :Juknis Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan, Dinsos Prop Jateng Tahun 2020).

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan

yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dan anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan pemberdayaan keluarga atau masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sumber sosial yang ada di masyarakat.

Persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan Usaha Ekonomi Produktif adalah jumlah Keluarga Fakir Miskin (FM), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lanjut Usia Terlantar Potensial (LUT Pot) dan Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan yang mendapat penanganan sosial di bidang ekonomi dengan mendapatkan pelatihan ketrampilan berusaha, stimulan bantuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi .

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan ekonomi produktif dibagi jumlah KK miskin dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2015 s.d 2020 s.d TW II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12.1
Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang mendapat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	850	320	320	380	336	110
2	Jumlah KK miskin (data kemiskinan)	68.904	68.904	101.992	101.992	103.280	120.876
3	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Penanganan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	1,23	0,46	0,32	0,37	0,33	0,09

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Jumlah KK miskin pada Tahun 2015 sd 2016 bersumber dari data PMKS Dinas Sosial. Sedangkan Tahun 2017 dan

2018 bersumber dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan data PMKS Jumlah KK Miskin mulai tahun 2015 sd 2016 adalah 68.904 sedangkan target penanganan setiap tahun adalah 320 sehingga terjadi kenaikan prosentase fakir miskin yang memperoleh bantuan UEP dari 0,35 % menjadi 0,46 %. Sedangkan mulai tahun 2017 dan 2018 karena sasaran kegiatan berbeda, sehingga mengalami penurunan dengan target per tahun yang sama yaitu dari 0,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,37% . Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 0,33% dikarenakan adanya perbedaan sasaran sedangkan untuk tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait penanganan COVID-19.

Berikut adalah sebaran penerima bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif untuk Keluarga Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Lanjut Usia Potensial, dan Keluarga Miskin Tepi hutan.

Tabel 12.2
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi PRSE, FM, Lut Pot, Dan KRSE Tepi Hutan Tahun 2017-2020 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
1	Jumo	FM	30	-	-	20
		PRSE	30	-	-	-
		LUT POT	20	-	-	-
2	Gemawang	FM	30	-	-	-
		PRSE	30	-	16	-
		LUT POT	20	30	-	-
		Tepi hutan	-	-	20	-
3	Wonoboyo	FM	10	30	10	-
		PRSE	-	-	10	-
4	Candiroto	FM	-	30	-	-
		PRSE	20	-	20	-
5	Bejen	PRSE	20	-	-	-
6	Kranggan	LU POT	20	-	-	-

NO	KECAMATAN	JENIS KPM	2017	2018	2019	2020
		PRSE	-	-	10	-
7	Kaloran	FM	-	-	20	-
		PRSE	-	30	10	30
		LUT POT	20	-	-	-
8	Kandangan	PRSE	-	-	10	-
		LUT POT	20	30	20	-
9	Tretep	FM	30	30	20	-
		LU POT	-	-	10	-
		TEPI HUTAN-	20	-	-	-
10	Kledung	FM	-	-	20	-
11	Ngadirejo	FM	-	30	20	-
12	Kedu	LU POT	-	30	10	-
13	Parakan	LU POT	-	20	20	-
		PRSE	-	30	20	-
14	Pringsurat	FM	-	-	10	10
		PRSE	-	30	-	-
15	Selopampang	LU POT	-	10	20	30
		PRSE	-	-	10	-
		TEPI HUTAN	-	20	-	-
16	Temanggung	PRSE	-	30	-	-
17	Tembarak	LU POT	-	-	10	-
		TEPI HUTAN				20
20	Bulu	LU POT	-	-	10	-
		PRSE	-	-	10	-
JUMLAH			320	380	336	110

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada Tahun 2017 ada 9 Kecamatan, sedangkan pada Tahun 2018 ada 12 Kecamatan dengan jumlah sasaran 320 KK dan pada tahun 2019 ada 14 kecamatan dengan jumlah sasaran 336 KK.

Berdasarkan tabel diatas, pada Tahun 2020 semula jumlah sasaran 320 KK sedangkan realisasi bantuan usaha ekonomi produktif jumlah sasaran menjadi 110 KK yang tersebar di 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Jumo, Pringsurat, Selopampang, Kaloran dan Tembarak, hal

ini dikarenakan adanya refocusing anggaran terkait adanya penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 12.3
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-
5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	APBD II	-	-	1	-
	JUMLAH		20	12	53	1

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

12. Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian Sosial)

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e Warong. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, Kementerian

Sosial)

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. (menurut : Pedoman Umum program Sembako Tahun 2020, kementerian Sosial)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dimasa pandemi virus corona.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%.

Realisasi persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari Tahun 2015 s.d 2020 s.d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13.1
 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	49.186	47.742	100.534
2	Jumlah DT PPFM Skala Kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	n.a	n.a	n.a	101.992	103.280	120.876
3	Persentase jumlah KK Miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun	n.a	n.a	n.a	48,9	46,23	83,17

Sumber :Bidang Penanganan FM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako pada Tahun 2020 sampai triwulan IV adalah sejumlah 100.534 KK terdiri dari 76.443 KK Program Sembako baik reguler maupun perluasan ditambah dengan PPKS penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 24.091 KK. Dari jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terkait bantuan sosial yaitu sejumlah 87,42 %. Hal ini dikarenakan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perluasan program sembako dan KPM BST yang muncul akibat adanya kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19. Di Tahun 2020 untuk program sembako terdapat perubahan jenis komoditas, yang semula berupa beras dan telur berubah menjadi komoditas yang memenuhi unsur karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2018, dimana setiap Keluarga Penerima Manfaat mendapat uang yang tersimpan dalam *e-wallet* sejumlah Rp. 110.000,- untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu beras dan telur. Pada triwulan IV Tahun 2020 jumlah penyerapan anggaran untuk program sembako adalah sebesar Rp.

156.515.800.000,- dengan besaran bantuan Rp. 150.000/KPM dari bulan Januari-Februari 2020 dan naik menjadi Rp.200.000,- dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020.

Tabel 13.1
Data Persebaran BST dan BSP
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	KECAMATAN	BST POS & HIMBARA	BSP SP2D DESEMBER
1	Bansari	495	2228
2	Bejen	776	2779
3	Bulu	1689	5911
4	Candiroto	950	3960
5	Gemawang	618	3879
6	Jumo	846	3270
7	Kaloran	1291	5209
8	Kandangan	1277	4740
9	Kedu	1814	4815
10	Kledung	396	2687
11	Kranggan	2032	3359
12	Ngadirejo	2554	7921
13	Parakan	3372	5060
14	Pringsurat	1640	4159
15	Selopampang	701	2491
16	Temanggung	8332	4845
17	Tembarak	1151	3590
18	Tlogomulyo	684	2253
19	Tretep	327	2472
20	Wonobojo	611	2856
Grand Total		31.556	78.484

13. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang

dalam dalam pengelolaannya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %.

Jumlah Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14.1
Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TMP yang dipelihara	2	2	2	2	2	2

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung yang terpelihara adalah sejumlah 2 buah sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100 %.

Tabel 14.2
Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan
Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Krangga	Terpelihara rutin

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

14. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah wadah atau tempat himpunan anggota kelompok yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang

atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) bersama. (Menurut: petunjuk Teknis kegiatan Penangan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan Tahun 2020, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan rumus Jumlah sasaran KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD skala kabupaten dalam 1 Tahun dikali 100%.

Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15.1

PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	320	850	320	320	500	100
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	68.904	68.904	68.904	101.992	103.280	115.003
3	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	0,48	1,23	0,46	0,46	0,48	0,08

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Jumlah PMKS di Kabupaten Temanggung yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya selama 3 (tahun) tahun terakhir semakin meningkat, sedangkan pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 prosentase PMKS yang peroleh Program pemberdayaan

sosial melalui KUBE target pertahunnya adalah 320 orang dan di tahun 2019 adalah 500 orang. Pada tahun 2020 kegiatan program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya terdapat 6 KUBE namun yang terealisasi hanya 1 (satu) KUBE terdiri dari 10 KK dari wilayah Kecamatan Bansari dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

Tabel 15.3
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE)

NO	KECAMATAN	SUMBER DANA	2017	2018	2019	2020
1	Parakan	APBD I	10	-	-	-
2	Ngadirejo	APBD I	10	-	-	-
3	Kranggan	APBD I	-	10	-	-
		Aspirasi	-	2	-	-
4	Bansari	APBD II	-	-	5	1
		Aspirasi	-	-	2	-
5	Temanggung	APBD I	-	-	10	-
		Aspirasi	-	-	3	-
6	Pringsurat	Aspirasi	-	-	1	-
7	Tembarak	Aspirasi	-	-	13	-
8	Kedu	Aspirasi	-	-	7	-
9	Kandangan	Aspirasi	-	-	2	-
10	Candiroto	Aspirasi	-	-	2	-
11	Jumo	Aspirasi	-	-	1	-
12	Gemawang	Aspirasi	-	-	2	-
13	Bejen	Aspirasi	-	-	1	-
14	Kledung	Aspirasi	-	-	1	-
15	Tretep	Aspirasi	-	-	1	-
16	Tlogomulyo	Aspirasi	-	-	1	-
17	Selopampang	Aspirasi	-	-	1	-
	JUMLAH		20	12	53	1

Sumber : Bidang Penanganan FM Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2020

Berdasarkan sebaran sasaran perkecamatan pada tahun 2017 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 20 KUBE, sedangkan pada tahun 2018 ada 2 Kecamatan dengan jumlah sasaran 12 KUBE terdiri dari 320KK dan pada Tahun 2019 ada 13 kecamatan dengan jumlah sasaran 53 KUBE terdiri dari 336 KK. Sedangkan di Tahun 2020, hanya terealisasi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bansari dengan jumlah 1 KUBE terdiri dari 10 KK.

2.3. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, didasarkan pada data dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjemjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa/kelurahan sehingga layanan aduan, rujukan penanganan kemiskinan menjadi 1 pintu.

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan anggaran di 2 sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000 untuk 73 KK sebesar Rp. 18.250.000,-.
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Tawang Sari Kecamatan Wonobojo sebesar Rp. 50.000.000,-

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.4.1 berikut:

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					13.856.179.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					29.153.179.000		
	PAGU MUSRENGBANG							PAGU MUSRENGBANG							
	PAGU TOTAL							PAGU TOTAL							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5.061.561.500	1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					5.061.561.500		
A.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28.382.279	A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					28.382.279		
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah	7	Buku	2.000.000	1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHAN RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah	7	Buku	2.000.000		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP,	26	Buku	26.382.279	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Temanggung	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKjIP,	3	buku	26.382.279		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)							EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)				
			Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	2	kegiatan	-				Terlaksananya penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	2	kegiatan		
B.	Administrasi Keuangan					3.773.979.221	B.	Administrasi Keuangan					3,773,979,221	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,773,979,221	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,773,979,221	
C.	Administrasi Umum					140.000.000	A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					140.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	10,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	10,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	20,000,000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	20,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	10,000,000	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	10,000,000	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	40,000,000	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	40,000,000	
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	60,000,000	5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	60,000,000	
D.	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah					859.200.000	D.	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah					859.200.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak	12	bulan	6.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak	12	bulan	6.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			diperbolehk n lagi)							diperbolehk n lagi)				
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	75.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25.000.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	25,000,000	
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tsk dan 2 SS disabilitas)	12	bulan	735.200.000	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 tsk dan 2 SS disabilitas)	12	bulan	753.200.000	
			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	12	bulan					Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (2 kebersihan dan 6 satpam)	12	bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
E.	Pemeiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					260.000.000	E.	Pemeiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					260.000.000	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	160.000.000	1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	160.000.000	
			rlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	12	bulan					rlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Suku cadang, oli, BBM)	12	bulan		
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	12	bulan	100.000.000	2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, pembuatan kanopi	12	bulan	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					530.321.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					15,530,321,000	
A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	A.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		- terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ijin undian dan ijin pengumpulan uang/barang	3	kegiatan	20.000.000	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		- terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan Ijin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ijin undian dan ijin pengumpulan uang/barang	3	kegiatan	20.000.000	
B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					510.321.000	B.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					15,510,321,000	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS (PSM, Karang taruna Dan Tagana)	289 PSM, 40 KT, 60 TAGANA, 60 UEP, 5 KUBE50	orang	195.000.000	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS (PSM, Karang taruna Dan Tagana)	- 289 PSM - 40 KT - 60 Tagana - 90 UEP - KUBE 50	orang	195.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS dalam Asistensi kegiatan UEP dan KUBE							- terfasilitasinya pemberdayaan PSKS dalam Asistensi kegiatan UEP dan KUBE				
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan TKSK - terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	40	Orang	100.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan TKSK - terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	40	Orang	100,000,000	
										Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000	73	KK	18.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan keluarga pioneer	20	keluarga	20.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		- terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan keluarga pioneer	20	keluarga	20.000.000	
										Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo	1	Desa	50.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	KT 3x IPSM 3x Komda 1x LKKS 2x WKSBM 1x bansos sarpras lksa 1x SLRT 1x	Bulan	180.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	KT 3x IPSM 3x Komda 1x LKKS 2x WKSBM 1x bansos sarpras lksa 1x SLRT 1x	Bulan	15,180,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		terfasilitasinya kegiatan	12	Bulan	15.321.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		terfasilitasinya kegiatan	12	Bulan	15.321.000	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000	
A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan					20.000.000	A.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan					20.000.000	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		"Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"	100	%	20.000.000	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		"Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"	100	%	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.345.400.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2,345,400,000	
A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.440.400.000	A.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1,440,400,000	
1	Penyediaan Permakanan		Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial Terlantar Penyandang Disabilitas	100	%	39.000.000	1	Penyediaan Permakanan		Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial TerlantarPenyandang Disabilitas melalui RPS	100	%	39.000.000	
2	Penyediaan Sandang (RPS)		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia	100	%	25.000.000	2	Penyediaan Sandang (RPS)		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia	100	%	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang Disabilitas							terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang Disabilitas melalui RPS				
3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat	50	buah	80.000.000	3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat	50	buah	80.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Netra, dan Kruk							Netra, dan Kruk				
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial , dan KPO	100	%	30.000.000	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial dan Klien RPS	100	%	30.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	100	%	30.000.000	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitasi bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	100	%	30.000.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang		Terlaksananya bimbingan sosial, Pemenuhan Kebutuhan	100	%	385.400.000	6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang		Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien	100	%	385.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		dasar dan Tersedianya Sarana Prasarana bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terlantar melalui UPTD Rumah Singgah					Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		terlantar melalui RPS				
7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban	100	%	10.000.000	7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar							Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar				
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar	100	%	50.000.000	8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar melalui RPS	100	%	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Warga Negara Korban Perdagangan dan keluarga miskin	100	%	771.000.000	9	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan	100	%	771.000.000	
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang	100	%	10.000.000	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
11	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya a layanan rujukan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang yang memerlukan rujukan	100	%	10.000.000	11	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya a layanan rujukan bagi klien yang memerlukan	100	%	10.000.000	
B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					905.000.000	B.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					905.000.000	
1	Pemberian Layanan Kedaruratan		Terlaksananya a layanan penanganan kedaruratan bagi klien terlantar	100	%	800.000.000	1	Pemberian Layanan Kedaruratan		Terlaksananya a layanan penanganan kedaruratan bagi klien terlantar	100	%	800.000.000	
2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar	100	%	10.000.000	2	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar	100	%	30.000.000	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar	100	%	30.000.000	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	10.000.000	4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		terlaksananya fasilitasi administrasi kependudukan pada kasus klien terlantar	100	%	5.000.000	5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		terlaksananya fasilitasi administrasi kependudukan pada kasus klien terlantar	100	%	5.000.000	
6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	15.000.000	6	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar	100	%	15.000.000	
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus klien RPS terlantar	100	%	10.000.000	7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus klien RPS terlantar	100	%	10.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
8	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan	100	%	15.000.000	8	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan	100	%	15.000.000	
9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	1	Kegiatan	10.000.000	9	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial	1	Kegiatan	10.000.000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.876.096.500	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					2,164,096,500	
A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1.072.987.500	A.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					1,072,987,500	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan permakanaan anak panti	381	anak	1.052.987.500	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan permakanaan anak panti	381	anak	1,052,987,500	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses adopsi anak	100	%	10.000.000	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses adopsi anak	100	%	10.000.000	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		terlaksananya porseni anak panti			10.000.000	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		terlaksananya porseni anak panti			10.000.000	
B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					803.109.000	B.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,091,109,000	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	16	Kegiatan	330.000.000	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)	16	Kegiatan	330.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	100	%	10.000.000	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)	100	%	10.000.000	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Bansos KJS dan UEP	100	%	288.109.000	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Bansos KJS dan UEP	100	%	288.109.000	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		%	175.000.000	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		%	463.000,000	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3.931.800.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3,931,800,000	
A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					3.821.800.000	A.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					3,821,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	90.000.000	1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	90.000.000	
2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	55.000.000	2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung	100	%	55.000.000	
3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat /Keluarga Rentan di Kab Temanggung	2400	orang	3.676.800.000	3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat /Keluarga Rentan di Kab Temanggung	2400	orang	3.676.800.000	
B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					110.000.000	B.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Terbentukny a 1 Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung			10.000.000	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Terbentukny a 1 Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung			10.000.000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terbentukny a Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung			100.000.000	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terbentukny a Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung			100.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000	
A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100.000.000	A.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					100.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota		Terpelihar an ya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP	2	lokasi	100.000.000	1	Pemeliharaa an Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota		Terpelihar an ya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP	2	lokasi	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Bambang Sugeng Kranggan							Bambang Sugeng Kranggan				

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5.1

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel Butuh Kec. Temanggung	terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako	73 paket/ Rp. 18.250.000,-	Usulan murenbang Kel. Butuh Kec. Temanggung
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot	- Ds. Soropadan Kec. Pringsurat - Ds. Tawang Sari Kec. Wonoboyo	terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT)	1 paket/Rp. 110.000.000,- 1 paket/ Rp. 50.000.000,-	Aspirasi Wabup Usulan murenbang

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.1
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	CONTOH						
1	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	TKSK, petugas layanan,	APBD II	Penanganan informasi data dan layanan , pemutakhiran daftar penerima manfaat		Meningkatnya layanan data dan informasi secara terintegrasi	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Sosial ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7.1
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	CONTOH			
1	Piagam Penghargaan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019	Menteri Sosial Republik Indonesia	Nasional	Dinas Sosial
2	Piagam Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinas Sosial
3	Piagam Penghargaan sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang berhasil mendorong Graduasi	Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial	Nasional	Dinas Sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Sosial lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Dinas Sosial melaksanakan SPM di bidang sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Sedangkan untuk SDG's, Dinas Sosial mendukung untuk mencapai Goal 1, yaitu Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dengan target sebagai berikut:

- a. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan
- b. Pada Tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya
- c. Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem.

Disamping mendukung SPM dan SDG's, Dinas Sosial juga melaksanakan program yang bersifat nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iur Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan sebagainya. Untuk program tingkat provinsi juga ikut melaksanakan seperti program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari urusan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya. Adapun sasaran dari urusan sosial adalah Meningkatkan Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilaksanakan dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Sosial Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2022
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pelayanan dasar bagi PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		%	100	100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		%	100	100	
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	%	100	100		

		dasar tuna sosial diluar panti			
		Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	%	1,22	1,22
Meningkatnya PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	80	80
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	90	90
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	10,1	10,1
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100
Meningkatnya jumlah PSKS yang melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26	26
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2019-2

Kebijakan dan strategi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.153.179.000	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32,673.028.621	
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.061.561.500	1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,061,561,221	
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.382.279	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,382,000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.382.279		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,382,000	
b	Administrasi Keuangan	3.773.979.221	b	Administrasi Keuangan	3.773.979.221	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.979.221		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.979.221	
	Belanja Pegawai			Belanja Pegawai		
c	Administrasi Umum	140.000.000	c	Administrasi Umum	140.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000	
d	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	859.200.000	d	Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	859.200.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	753.200.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	753.200.000	
e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	260.000.000	e	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	260.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	160.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	160.000.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100.000.000		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	15.530.321.000	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	15,708,571,000	
a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	a	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20.000.000	
b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15.510.321.000	b	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15,771.171.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	195.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	195.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	118,250,000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000	18.250.000	18.250.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.180.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15,340,000,000	
				MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonoboyo	50.000.000	50.000.000

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
				Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat	110.000.000	110.000.000
				Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang Taruna Kabupaten	82.600.000	82.600.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.321.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.321.000	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	20.000.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.345.400.000	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.345.400.000	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.440.400.000	a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.440.400.000	
	Penyediaan Permakanan	39.000.000		Penyediaan Permakanan	39.000.000	
	Penyediaan Sandang (RPS)	25.000.000		Penyediaan Sandang (RPS)	25.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyediaan Alat Bantu	80.000.000		Penyediaan Alat Bantu	80.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	385.400.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	385.400.000	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	771.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	771.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	905.000.000	b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	905.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000		Pemberian Layanan Kedaruratan	800.000.000	
	Penyediaan Permakanan			Penyediaan Permakanan		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	10.000.000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	10.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	10.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	15.000.000		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	15.000.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000		Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.164.096.500	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5,423,096,500	
a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.072.987.500	a	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.072.987.500	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.052.987.500		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.052.987.500	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000		Rujukan Anak-Anak Terlantar	10.000.000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10.000.000		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	10.000.000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.091.109.000	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,350,109,000	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	330.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288.109.000		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	288,109,000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	463.000.000		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3,722,000,000	2,576,000,000
				Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE	288.000.000	288.000.000

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
				Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitasi) se Kab. Temanggung	2.576.000.000	2.576.000.000
				Aspirasi wakil Bupati pembardayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)	220.000.000	220.000.000
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.931.800.000	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,931,800,000	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.821.800.000	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3.821.800.000	
	Penyediaan Makanan	90.000.000		Penyediaan Makanan	90.000.000	
	Penyediaan Sandang	55.000.000		Penyediaan Sandang	55.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	3.676.800.000		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	3.676.800.000	
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	b	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100.000.000	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99,999,900	

RANCANGAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,999,900	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,999,900	
	JUMLAH	29.153.179.000		JUMLAH	32,590,428,621	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 3.259.000.000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya bantuan sosial sembako Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung, @250.000.
2. MUSRENGBANG : Terfasilitasinya pembinaan kelembagaan Karang Taruna desa Pesantren Kecamatan Wonobojo.
3. Aspirasi Wabup: Pengembangan kelembagaan Karang Taruna Ds. Soropadan Kec. Pringsurat.
4. Aspirasi Wabup: Bantuan hibah untuk Karang Taruna Kabupaten.
5. Aspirasi Bupati pemberdayaan PSM pendamping KUBE.
6. Aspirasi Bupati pemberdayaan KUBE (bansos dan fasilitasi) se Kab. Temanggung.
7. Aspirasi wakil Bupati pembardayaan ekonomi keluarga melalui UEP (Ds. Danurejo Kec. Kedu)

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Temanggung
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					32,673,028,621			28,839,796,721			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,061,561,221			5,066,179,221			
1	#	#	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					28,382,000			33,000,000			
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan RENJA, PERUBAHANRENJA, PK, RKA, DPA, RKPA,dan DPPA Perangkat Daerah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 buku		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			3,000,000
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKJIP, EVALUASI RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 buku		26,382,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000
1	#	#	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,773,979,221			3,773,979,221			

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1 6 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									3,773,979,221	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3,773,979,221
1	#	#	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						140,000,000				140,000,000	
1 6 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				10,000,000
1 6 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alata Tulis Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan		20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20,000,000
1 6 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10,000,000
1 6 1 2.06 8	Fasilitasi Kunjungan TamU		Tersedianya Makanan dan Minuman		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan		40,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			60,000,000
1	#	#	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					859,200,000				859,200,000			
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan transport (SPPD dalam daerah tidak diperbolehkan lagi)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6,000,000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								25,000,000				25,000,000
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								753,200,000				753,200,000
1	#	#	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					260,000,000				260,000,000			

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								160,000,000				160,000,000	
1 6 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								100,000,000				100,000,000	
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								15,708,571,000				15,530,321,000	
1 # # 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								20,000,000				20,000,000	
1 6 2 2.02 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		" terfasilitasinya sosialisasi mengenai aturan ljin undian dan pengumpulan uang atau barang - terfasilitasinya permohonan ljin undian dan ljin pengumpulan uang/barang"		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 kegiatan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20,000,000	
1 # # 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								15,688,571,000				15,510,321,000	
1 6 2 2.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				195,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			195,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		terfasilitasinya kegiatan pendampingan sembako		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 orang		118,250,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			100,000,000	
							terfasilitasinya kegiatan TKSK			40 orang								
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							20,000,000				20,000,000		
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Terbangunnya Gedung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 unit		15,442,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			15,180,000,000	
							terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan PSKS lembaga (Karang Taruna, IPSM, Komda Lansia, LKKS, WKSBM, LKSA, SLRT, Aspirasi Wabup : Karang Taruna Kabupaten)			12 kegiatan								

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		- terfasilitasinya kegiatan LK3		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		15,321,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,321,000	
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20,000,000				20,000,000				
1	#	#	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					20,000,000				20,000,000				
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								20,000,000				20,000,000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2,345,400,000				2,315,400,000				
1	#	#	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1,440,400,000				1,410,400,000				

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan		Tersedianya kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar , anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial TerlantarPenyandang Disabilitas melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			39,000,000
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang		Tersedianya Kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut Usia terlantar dan tuna sosial terlantar Penyandang Disabilitas melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu		Tersedianya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak, Kursi roda standar Dewasa, alat bantu jalan kaki 3, Tongkat Bantu jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Netra, dan Kruk		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 buah		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Terlayannya reunifikasi keluarga Disabilitas ,Tuna sosial dan Klien RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Tersedianya Fasilitas bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlaksananya bimbingan sosial bagi keluarga klien terlantar melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		385,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			385,400,000	
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000				10,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlanjar melalui RPS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		771,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			771,000,000
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi klien yang memerlukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000
1	#	#	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						905,000,000				905,000,000		

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan												800,000,000			800,000,000
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Tersedianya perbekalan kesehatan dasar bagi klien terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						10,000,000
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Terlaksananya bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial pada kasus Anak dan Lanjut Usia terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						30,000,000
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Terlaksananya bimbingan sosial kepada Keluarga dari Anak dan Lanjut Usia Terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						10,000,000
1	6	4	2.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak								5,000,000							5,000,000
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Terlaksananya pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi kasus Anak dan Lanjut Usia Terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						15,000,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Terlaksananya layanan penelusuran Keluarga bagi kasus kasus Kliien RPS terlantar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan		Terlaksananya layanan rujukan bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar yang memerlukan rujukan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			15,000,000	
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Terlaksananya kerjasama antar Dinas Sosial dengan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 kegiatan		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							5,423,096,500				1,876,096,500		
1	#	#	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							1,072,987,500				1,072,987,500		
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Terfasilitasinya bantuan Permakanan Anak Panti Asuhan di 8 Panti (381 anak x 365 hr x Rp 7500 dan Fasilitasi 10 Jt		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		381 anak		1,052,987,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1,052,987,500	
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya proses Adopsi Anak		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 5 2.01 3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Terlaksananya Porseni Anak Panti		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1 # # 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								4,350,109,000					803,109,000
1 6 5 2.02 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS, PBI, PPKS, PSKS)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 kegiatan		330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				330,000,000
1 6 5 2.02 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DTKS)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
1 6 5 2.02 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Terfasilitasinya bisnis proses PKH, Terfasilitasinya Bantuan Sosial KJS		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		288,109,000					288,109,000
1 6 5 2.02 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Terfasilitasinya 5 KUBE @ Rp 10 jt & 60 PM UEP @ Rp 2 jt dan Fasilitasi 5 Jt		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		3,722,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				175,000,000
1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								3,931,800,000					3,931,800,000
1 # # 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								3,821,800,000					3,821,800,000

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan		Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Korban Bencana di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		90,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			90,000,000	
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang		Terpenuhinya kebutuhan Sandang bagi Korban Bencana di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			55,000,000	
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Terfasilitasinya Santunan Kematian bagi masyarakat miskin/Keluarga Rentan di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2400 orang		3,676,800,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			3,676,800,000	
1	#	#	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							110,000,000				110,000,000		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Meningkatnya Kemampuan Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) sejumlah 30 org anggota di Kab Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	

RENJA 2022 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 6 6 2.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Terfasilitasinya penanggulangan bencana Forum TAGANA dan Terbentuknya Anggota TAGANA Muda sejumlah 2 org x 20 Kec = 40 org di Kab. Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100,000,000
1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								99,999,900					100,000,000
1 # # 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								99,999,900					100,000,000
1 6 7 2.01 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								99,999,900					100,000,000
TOTAL									32,590,428,621				28,839,796,721	

Temanggung, September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S. Ag, M, M

Pembina Tk I
NIP. 19660402 198903 1 013

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Sosial itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I realisasi Belanja Langsung sebesar 13 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 13.865.179.000,- yang terdiri dari 7 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana Dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta indikator kinerja program sebanyak 16. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah

dilaksanakan di Dinas Sosial ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Sosial dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

PRASODJO, S.Ag., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19660402 198903 1 013